

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA GURU DI SMK THURSINA KECAMATAN TANJUNGMEDAR  
KABUPATEN SUMEDANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar  
Magister Sains (M.Si) Konsentrasi Ilmu Administrasi Negara pada Program  
Pascasarjana Bidang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

**Disusun Oleh :  
CECEP HASANUDIN  
NPM : E. 050 116 0001)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADIMINISTRASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
SEBELAS APRIL SUMEDANG  
2021**


**PENGARUH PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA GURU DI SMK THURSINA KECAMATAN  
TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG**

**TESIS**

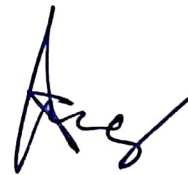
Diajukan dalam rangka memenuhi syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar  
Gelar Magister Sains (M.Si) Konsentrasi Administrasi Negara pada Program  
Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

**Disusun Oleh :  
CECEP HASANUDIN  
NPM : E. 050 116 0001)**

**Diterima dan disetujui untuk dipertahankan  
Komisi Pembimbing**

*Acc 22 Juli 2021*  


**Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si  
Pembimbing I**

*Acc 13/6-2021*  


**Dr. Dadang Priyatna, M.Si  
Pembimbing II**

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA GURU DI SMK THURSINA KECAMATAN  
TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG**

**TESIS**

Diajukan dalam rangka memenuhi syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar  
Gelar Magister Sains (M.Si) Konsentrasi Administrasi Negara pada Program  
Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

**Disusun Oleh :  
CECEP HASANUDIN  
NPM : E. 050 116 0001)**

**Mengetahui:  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



**RIKA KUSDINAR, S.Sos.,M.Si.  
NIDN.04-3012-7102**

**SEBELAS APRIL  
SUMEDANG**

## ABSTRAK

CECEP HASANUDIN NPM : E 050 116 0001

### PENGARUH PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA GURU DI SMK THURSINA KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG

TESIS, 2021, 5 Bab, 152 halaman

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran serta variabel terikat yaitu Kinerja Guru. Populasi penelitian ini adalah pegawai sebanyak 20 orang dengan menggunakan sampel.

Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (X1) dan Transparansi Anggaran (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Guru (Y) sebesar 87, 30% sedangkan sisanya sebesar 12, 70% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap Kinerja Guru SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar. Besar pengaruh secara parsial Pengelolaan Dana BOS terhadap kinerja guru SMK Thursina adalah sebesar 69, 30% dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru SMK Thursina 86, 60%. Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu  $F_{hitung} = 58,292 > F_{tabel} = 3,55$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Anggaran berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan agar pihak sekolah harus dapat memberikan pelayanan yang sesuai juknis serta memotivasi siswa dan masyarakat agar dapat bekerjasama meningkatkan prestasi sekolah. Selain itu, faktor yang harus jadi perhatian juga adalah kesejahteraan guru harus lebih ditingkatkan serta adanya *reward and punishment* yang jelas karena berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti guru mengeluhkan masih rendahnya kesejahteraan guru hal ini karena kesejahteraan merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja pegawai dalam hal ini guru.

Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini perlu ditindak lanjuti lebih luas dan mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja guru khususnya di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Efektif, efisiensi, kinerja guru

## ABSTRACT

CECEP HASANUDIN NPM : E 050 116 0001

### *THE EFFECT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE MANAGEMENT AND BUDGET TRANSPARENCY ON TEACHER PERFORMANCE AT THURSINA VOCATIONAL SCHOOL, TANJUNGMEDAR DISTRICT, SUMEDANG DISTRICT*

*THESIS, 2021, 5 Chapters, 152 pages*

*In general, this study aims to analyze the effect of School Operational Assistance Fund Management (BOS) and Budget Transparency on Teacher Performance at Thursina Vocational School, Tanjungmedar District, Sumedang Regency.*

*The research method used descriptive analysis method, the research variable consists of the independent variable, namely the management of School Operational Assistance (BOS) funds and Budget Transparency and the dependent variable, namely Teacher Performance. The population of this study were employees as many as 20 people using a sample.*

*The analysis used using multiple regression analysis simultaneously. The results of the study show that the Management of School Operational Assistance Funds (BOS) (X1) and Budget Transparency (X2) affect Teacher Performance (Y) by 87.30% while the remaining 12.70% is influenced by other variables outside the variables studied that are not included in the model.*

*Management of School Operational Assistance Funds (BOS) and Budget Transparency have a real and positive impact on Teacher Performance at Thursina Vocational School, Tanjungmedar District. The partial effect of BOS Fund Management on the performance of Thursina Vocational High School teachers is 69, 30% and budget transparency on the performance of Thursina Vocational High School teachers 86, 60%. Based on the test, the Fcount value is greater than the Ftable value, namely  $F_{count} = 58.292 > F_{table} = 3.55$ . From this value, the decision  $H_0$  was rejected, so that the variables of BOS Fund Management and Budget Transparency had a significant and positive effect on the Teacher Performance variable at Thursina Vocational School, Tanjungmedar District, Sumedang Regency.*

*Based on the conclusions, it is recommended to increase knowledge and training so that the school must be able to provide services according to technical guidelines and motivate students and the community to work together to improve school performance. In addition, factors that must be a concern are the welfare of teachers must be further improved and the existence of clear rewards and punishments because based on the observations and observations of teachers, teachers complain about the low welfare of teachers, this is because welfare is one of the supporting factors for improving employee performance, in this case teachers. .*

*Given the various limitations in this research, it is necessary to follow up more broadly and in depth so that it can provide benefits for improving teacher performance, especially in Thursina Vocational School, Tanjungmedar District, Sumedang Regency.*

*Keywords: Financial Management, Effective, efficiency, teacher performance*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang”**. Penelitian ini menyoroti pengelolaan dana BOS dan transparansi anggaran serta pengaruhnya terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sepatutnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang Ibu Rika Kusdinar, S.Sos.,M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelajaran.
3. Ketua Prodi Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang, beserta seluruh dosen pengajar dan para karyawannya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Program Pascasarjana STIA Sebelas April Sumedang.
4. Prof. Dr. H.Tachjan, M.Si selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Dr. Dadang Priyatna, M.Si selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

6. Kepala SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Bapak H. Fathurahman, S.Pd.I. beserta jajaran pengajar dan staff tata usaha, yang



telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta bantuannya atas data beserta dokumen yang penulis butuhkan untuk melengkapi tesis ini.

7. Rekan mahasiswa Program Pascasarjana STIA Sebelas April Sumedang Angkatan XVI yang telah memberikan inspirasi, dukungan dan motivasi serta koreksi kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya tesis ini.
8. Keluarga tercinta Ibunda Elah Tarmilah, S.Pd, Ayahanda Nana Sutarna, S.Pd, Nenek Ibu Kacih (Almh)/ Rukasih dan Kakek Suranta (Alm)/ Aja Suharja, Kakak Ani Sri Mulyati, S.Pd.I/ Komarudin, S.Sos, Adik Dadi Mulyadi, M.Pd/ Febriana Ruspendi, M.Pd. dan Kamil Faishal Tanjung, A.Md, keponakan Asyifa Khoerunisa/ Nadira Ramadhani serta semua keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan do'a terbaik kepada penulis.
9. Istriku tercinta Nisa Rahmawati, anak-anaku Zidni Asyidik Hasanudin dan Nashir Sabili Rizqi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Keluarga besar MI Gununggeulis Ibu Kepala Een, S.Pd.I, staff pengajar beserta keluarga besar Operator KKMI Kabupaten Sumedang yang selalu memberikan motivasi penuh kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan kami harapkan demi kesempurnaan penelitian ini terutama untuk bahan kami dalam membuat Tesis. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti/ penulis dan umumnya bagi pembaca dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Aamiin..

Sumedang, Juli 2021

Cecep Hasanudin

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
C1. Maksud Penelitian .....	11
C2. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Secara Teoritis .....	11
2. Secara Praktis .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Hipotesis Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis Tentang Administrasi .....	23
1. Ruang Lingkup Kajian Administrasi .....	23
2. Ruang Lingkup Kajian Administrasi Negara.....	29
B. Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara .....	31
C. Tinjauan Setiap Variabel.....	37

1.	Tinjauan Umum Tentang Dana BOS .....	37
2.	Tinjauan Umum Tentang Transparansi Anggaran .....	42
3.	Tinjauan Umum Tentang Kinerja Guru.....	45
D.	Hubungan Antar Variabel .....	52
E.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	57

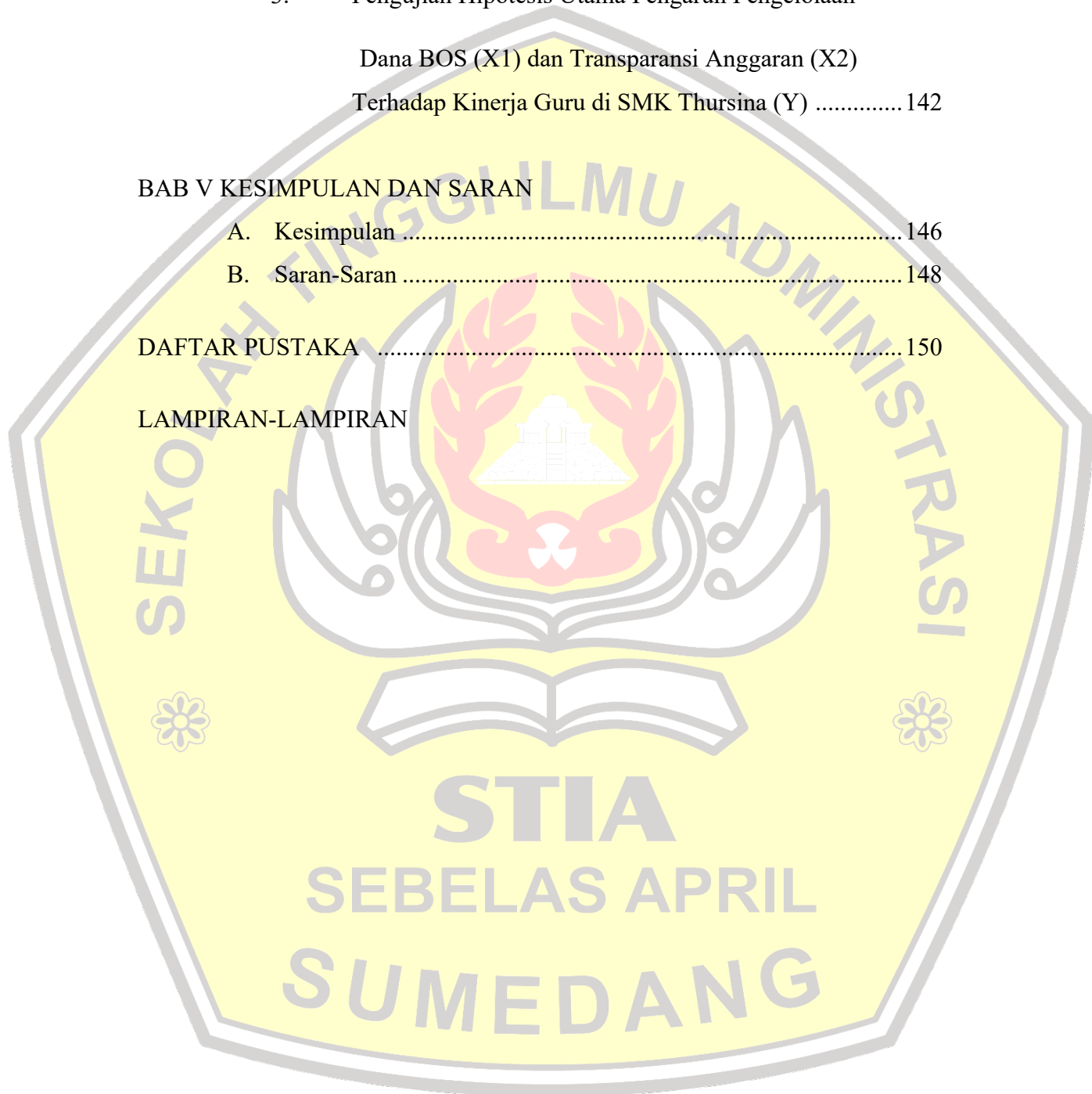
### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Metode Penelitian .....	61
B.	Variabel dan Paradigma Penelitian.....	63
1.	Variabel penelitian .....	63
2.	Paradigma Penelitian .....	64
C.	Definisi Operasional dan Operasional Variabel.....	65
1.	Definisi Operasional .....	65
2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	66
D.	Alat Ukur Penelitian, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	68
1.	Menguji Validitas.....	68
2.	Menguji Reabilitas.....	74
E.	Populasi dan Instrumen Penelitian .....	78
1.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	78
2.	Instrumen Penelitian.....	79
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	81
G.	Analisis Data .....	82
I.	Tempat, Waktu dan Langkah-Langkah Penelitian.....	84

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	89
1.	Struktur Organisasi pada SMK Thursina .....	94
2.	Karakteristik Responden .....	108
B.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	110
1.	Variabel Pengelolaan Dana BOS (X1) .....	111
2.	Variabel Transparansi Anggaran (X2) .....	120
3.	Variabel Kinerja Guru (Y) .....	129
C.	Pengujian Hipotesis Penelitian .....	140
1.	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pengelolaan Dana	

	BOS (X1) Terhadap Kinerja Guru (Y) .....	139
2.	Pengujian Sub Hipotesis Transparansi Anggaran (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) .....	141
3.	Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pengelolaan Dana BOS (X1) dan Transparansi Anggaran (X2) Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina (Y) .....	142
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
	A. Kesimpulan .....	146
	B. Saran-Saran .....	148
DAFTAR PUSTAKA .....		150
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	66
Tabel 3.2	Pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi.....	71
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana BOS (X1).....	71
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Transparansi Anggaran .....	72
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Kinerja Guru (Y) .....	73
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Dana BOS (X1).....	75
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Transparansi Anggaran (X2) .....	76
Tabel 3.8	Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Guru (Y) .....	77
Tabel 3.9	Pernyataan Positif dan Negatif.....	80
Tabel 3.10	Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r .....	83
Tabel 3.11	Jadwal Penelitian.....	85
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	108
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Usia .....	108
Tabel 4.3	Responden berdasarkan Pendidikan .....	109
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	109
Tabel 4.5	Pengelolaan Dana BOS .....	111
Tabel 4.6	Rekafitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Perencanaan .....	113
Tabel 4.7	Rekafitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Pelaksanaan.....	115
Tabel 4.8	Rekafitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Pengawasan.....	117
Tabel 4.9	Rekafitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Pertanggungjawaban .....	119
Tabel 4.10	Kriteria penilaian variabel Transparansi Anggaran (X1).....	121
Tabel 4.11	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Kualitas Informatif.....	122
Tabel 4.12	Rekafitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Keterbukaan .....	125

Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Kinerja Guru (Y).....	129
Tabel 4.14	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Bekerja Secara Individual .....	130
Tabel 4.15	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Persiapan Perencanaan Pembelajaran .....	132
Tabel 4.16	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Penggunaan Media Pembelajaran .....	134
Tabel 4.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Keterlibatan Siswa dalam Pengalaman .....	135
Tabel 4.18	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator-Indikator Pada Dimensi Dimensi Kepemimpinan Yang Aktif .....	137



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Paradigma Penelitian .....	65
Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian Kuantitatif.....	86
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	94
Gambar 4.2 Interval Dimensi Perencanaan.....	114
Gambar 4.3 Interval Dimensi Pelaksanaan .....	116
Gambar 4.4 Interval Dimensi Pengawasan.....	118
Gambar 4.5 Interval Dimensi Pertanggungjawaban .....	120
Gambar 4.6 Interval Dimensi Informatif .....	124
Gambar 4.7 Interval Dimensi Keterbukaan .....	126
Gambar 4.8 Interval Dimensi Pengungkapan .....	128
Gambar 4.9 Interval Dimensi Bekerja Secara Individual .....	131
Gambar 4.10 Interval Dimensi Persiapan Perencanaan Pembelajaran .....	133
Gambar 4.11 Interval Dimensi Pendayagunaan Media Pembelajaran.....	135
Gambar 4.12 Interval Dimensi Keterlibatan Siswa dalam Pengalaman .....	136
Gambar 4.13 Interval Dimensi Kepemimpinan Yang Aktif.....	138
Gambar 4.14 Paradigma Penelitian.....	140

**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket Penelitian
2. Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS 2021
3. RKAS 2021 SMK Thursina
4. Distribusi Frekuensi (Pengolahan SPSS 2021)
5. Hasil Uji Validitas X1, X2 dan Y (Pengolahan SPSS 2021)
6. Hasil Uji Reabilitas X1, X2 dan Y (Pengolahan SPSS 2021)
7. Hasil Uji Korelasional (Pengolahan SPSS 2021)
  - X1, X2 terhadap Y
  - X1 terhadap Y
  - X2 terhadap Y
8. Tabel Uji t
9. Tabel Uji r
10. Tabel Uji f
11. Rekapitulasi Jawaban Angket (X1, X2 dan Y)
12. SK Bimbingan
13. Surat Ijin Penelitian
14. Surat Telah Melaksanakan Penelitian
15. Berita Acara Bimbingan
16. Hasil Perbaikan Sidang Tesis

**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mengamanatkan kepada Negara Indonesia Bahwa "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Untuk mewujudkan amanat tersebut khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka kebijakan pendidikan nasional diarahkan pada empat pilar kebijakan, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal". Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan *gender*. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Implementasi pilar pertama yang perlu mendapat perhatian pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun”, dan selanjutnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Sebagai konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan yang sederajat.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diantaranya menaikkan besaran nominal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 100.000/ tahun di tahun 2020.

Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. BOS bertujuan untuk

memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 12 Tahun yang bermutu (*sumber : Buku Pedoman BOS 2011*).

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (*Mulyasa, 2004:194*).

*Nanang Fatah (dalam Mulyono, 2010: 78)* berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan perlatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan

jumlah murid di masing-masing sekolah. (*sumber: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*)

Demikian halnya, Program BOS di Kabupaten Sumedang secara konsep menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya di SMK Thursina Kabupaten Sumedang tentang program BOS ternyata belum sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak efektif dan efisiennya penyaluran dana, pemanfaatan serta pertanggungjawaban sekolah.

Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 12 tahun sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS.

Kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan tujuannya ditentukan oleh faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur serta teknologi, sedangkan faktor eksternal

antara lain koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat dan faktor lingkungan lainnya. Kedua faktor ini saling terkait dan mendukung. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan (*Sondang P. Siagian, 1997:151*).

Selain sekolah dituntut untuk mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik, juga laporan keuangan harus berorientasi pada akuntabilitas sehingga setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan pelaporan keuangan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap triwulan/semester demi tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan tidak bertentangan dengan kaidah/ aturan yang berlaku. Sehingga pihak sekolah/ pengelola BOS harus mampu menyusun laporan keuangan dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang berkepentingan/ membutuhkan data, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat.

Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur instrumental input (komponen didalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana

prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan BOS dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen pelaksanaan program ini.

Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan sekolah dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan lancar tanpa menemui berbagai hambatan. Salah satu pengelolaan dana BOS tersebut dialokasikan untuk pengembangan profesi tenaga kependidikan agar kinerja guru dapat meningkat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya kinerja yang tinggi suatu organisasi diharapkan dapat berjalan lancar dan berhasil, dan sebaliknya prestasi kerja yang rendah akan mengakibatkan suatu organisasi kemungkinan dapat macet atau berantakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan yang menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” (2001:143). Dengan demikian kinerja yang sangat tinggi dalam suatu organisasi perlu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, para kepala sekolah dan para guru di suatu sekolah perlu memahami pentingnya peningkatan kinerja untuk mengoptimalkan efektivitas kerja mereka seperti halnya di SMK Thursina Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Salah satu barometer keberhasilan pembinaan kinerja guru ditandai dengan meningkatnya kualitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih dinamis dan mandiri dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tuntutan kehidupan yang serba seimbang dan selaras dalam tatanan nasional dan internasional. Implikasi dari harapan itu, menurut guru yang berkualitas untuk senantiasa mampu memecahkan persoalan-persoalan kehidupan secara mandiri, dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan sejahtera.

Setelah dilaksanakan penelitian di SMK Thusina Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar, peneliti mendapatkan beberapa data yang diperoleh dimana setelah adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Thursina Tanjungmedar tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kinerja guru terutama dalam 5 tahun terakhir, dimana setelah peneliti melakukan observasi dan penelitian awal di lokasi penelitian didapatkan beberapa data dan laporan hasil obesrvasi dan wawancara diantaranya dengan guru, kepala sekolah, siswa, komite, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang hasilnya diantaranya adalah:

1. Terdapat guru yang mengajar asal-asalan dan tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak disiplinya dalam proses pembelajaran contohnya alokasi waktu yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan misalnya 45/ jam pelajaran hanya diisi dengan 30 menit.

2. Terdapat guru yang tidak menggunakan administrasi pembelajaran secara lengkap. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak jelasnya Program pembelajaran, silabus, RPP dan kurikulum yang tidak sesuai dengan standar kurikulum 2013.
3. Terdapat guru yang tidak melaksanakan pembagian tugas tambahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sebagian guru yang tidak melaksanakan tugas ekstrakurikuler sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Masih adanya pihak masyarakat yang sulit untuk mencari akses tentang pengelolaan dana BOS di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Dari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja guru tentunya sangat berkaitan dengan kurangnya transparansi anggaran, sehingga akan berpengaruh kepada kinerja guru di SMK Thursina. Adapun kendala yang berkaitan dengan transparansi anggaran adalah:

1. Kurangnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat/ guru dalam hal penyusunan kebijakan anggaran.
2. Masih terjadi keterlambatan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Sistem informasi kepada publik mengenai pelaporan dana BOS di SMK Thursina masih kurang.
4. Kurangnya akomodasi suara atau usulan dari berbagai pihak mengenai penggunaan dana BOS di SMK Thursina.

Dari indikator tersebut dilihat dari beberapa sudut pandang dan kajian tentang kinerja guru ternyata menunjukkan bahwa profesionalitas guru di SMK Thursina Tanjungmedar masih kurang, adapun kesimpulan awal bahwa kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang masih kurang, hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Pengelolaan BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan alokasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pihak sekolah, orang tua siswa, komite dan guru.
2. Pengelolaan BOS yang tidak terbuka dan laporan pertanggungjawabannya yang tidak masuk akal khususnya kepada guru dan kepala sekolah. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sebagian guru yang tidak mengetahui Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh pengelola BOS.
3. Pembagian BOS yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah diberikan guru yang bersangkutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pembagian kesejahteraan (Kesra) yang sama rata walaupun kinerja setiap guru berbeda.
4. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang transparan dan akuntabilitas masih kurang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru**

**di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang  
Tahun 2020”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali masalah pada analisis pengelolaan dana BOS. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalkan adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran serta pengaruhnya dalam peningkatan kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru di SMK Thursina Tanjungmedar Kabupaten Sumedang?
2. Adakah pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang?
3. Adakah pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

### C1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji fenomena masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi anggaran dan kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

### C2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS dan transparansi anggaran serta peningkatan kinerja guru.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

- c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka meningkatkan kinerja guru.
- d. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara yaitu memperkaya konsep evaluasi kebijakan terutama mengenai kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Siswa dan Orang Tua

- 1) Ikut terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah terutama dalam rangka meningkatkan kinerja guru.
- 2) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

### b. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kinerja guru.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran yang lebih efektif terutama dalam rangka meningkatkan kinerja guru

### c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran agar lebih efektif dan efisien terutama dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengamatan awal terdapat fenomena masalah yang dihadapi oleh SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar yaitu belum optimalnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran. Fenomena masalah tersebut mempengaruhi kinerja guru, oleh karena itu fenomena masalah tersebut menjadi fokus kajian administrasi negara dengan demikian hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut oleh administrasi negara.

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tatausaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi) dan *beheer* manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personil, gudang).

Eropa Barat seperti hal yang sama juga Jerman, Prancis, Italia memperolehnya dari bahasa Romawi. Di zaman Romawi terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan administrasi, antara lain :

- *Administer* = pembantu, abdi, kakitangan, penganut.
- *Administratio* = pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pemimpin, pemerintahan, pengelolaan.
- *Administro* = membantu, mengabdikan, memelihara, menguruskan, memimpin, mengemudikan, mengatur.
- *Administrator* = pengurus, pengelola, pemimpin.

## 1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS yang dimaksud dalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Yang menjadi prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan untuk biaya investasi.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semua proses harus dijalankan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan sekolah. Menurut Sahdan, (2012: 23) pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan, merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dan memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, artinya dalam mengelola dana BOS tentunya perencanaan pengeluaran anggaran harus ditentukan dengan jelas.
2. Pelaksanaan, semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3. Pengawasan, adalah proses penggunaan dana, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dikontrol oleh beberapa pihak terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
4. Pertanggungjawaban, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki peran serta aktif dalam memberikan

pelaporan pertanggungjawaban dana yang dipakai agar lebih transparan.

Dari prinsip-prinsip pengelolaan tersebut diatas dapat dijadikan ukuran untuk mengukur pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan termasuk di sekolah adapun pengelolaan keuangan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja pegawai dalam organisasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik/ maka dipastikan kinerja pegawai akan meningkat dan sebaliknya. Hal itu sejalan dengan pendapat Waluyo yang menyatakan bahwa “Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target pengelolaan keuangan/ anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran” (Waluyo, 2007:228).

## **2. Transparansi Anggaran**

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di rnungerti dan di pantau. Menurut Imam S. Tunggal dan W. Tunggal (2002: 7) transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan taranparansi jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinaya suara atau usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan daerah bersih, efektifitas, efisiensi, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009: 19) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

- 1) Informatif (*informativeness*)  
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) Keterbukaan (*openess*)  
Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat dapat di akses oleh pengguna informasi publik, selain dari informasi yang di kecualikan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Pengungkapan  
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) Atas aktivitas dan kinerja finansial.

Dari ketiga karakteristik tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengukur tingkat transparansi anggaran/ keuangan di instansi pemerintah. Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

### 3. Kinerja Guru

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Smith dalam (Mulyasa, 2005: 136) menyatakan bahwa kinerja adalah “.....*output drive from processes, human or otherwise*”. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kinerja atau *performance* dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja.

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Menurut Prawirasentono (1999: 2):

*Performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Dessler (1997: 513) menyatakan pengertian kinerja hampir sama dengan prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja aktual dengan standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerja. Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh

seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan standar kinerja guru Sahertian sebagaimana dikutip Kusmianto (1997: 49) dalam buku panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa:

Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan yang aktif dari guru”.

Kelima aspek tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugasnya terutama di lembaga pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.

Pendapat lain diutarakan Soedijarto (1993) menyatakan ada empat tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu: (1) merencanakan program belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses belajar mengajar; (4) membina hubungan dengan peserta didik. Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas tambahan.

Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester maupun persiapan mengajar. Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. *Georgia Departemen of Education* telah mengembangkan *teacher performance assessment instrument* yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana pembelajaran (*teaching plans and materials*) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan definisi konsep kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang

dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan siswanya.

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empirik serta perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis utamanya adalah terdapat pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang. Dengan sub hipotesis sebagai berikut:

- a. Hipotesis Utama
  - 1) Hipotesis Nihil ( $H_0$ ) :

Tidak terdapat pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

2) Hipotesis Kerja ( $H_1$ ) :

Terdapat pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

b. Sub-sub Hipotesis Penelitian

1) Hipotesis Nihil ( $H_0$ ) :

Tidak terdapat pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

2) Hipotesis Kerja ( $H_1$ ) :

Terdapat pengaruh pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

3) Hipotesis Nihil ( $H_0$ ) :

Tidak terdapat pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

4) Hipotesis Kerja ( $H_1$ ) :

Terdapat pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teoritis Tentang Administrasi

#### 1. Ruang Lingkup Kajian Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tatausaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi) dan *beheer* manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personil, gudang).

Eropa Barat seperti hal yang sama juga Jerman, Prancis, Italia memperolehnya dari bahasa Romawi. Di zaman Romawi terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan administrasi, antara lain :

- *Administer* = pembantu, abdi, kakitangan, penganut.
- *Administratio* = pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pemimpin, pemerintahan, pengelolaan.
- *Administro* = membantu, mengabdikan, memelihara, menguruskan, memimpin, mengemudikan, mengatur.
- *Administrator* = pengurus, pengelola, pemimpin.

Di zaman Romawi, seorang *administrator* adalah seseorang yang mendapat kepercayaan untuk melakukan tugas dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua kesatuan harta kekayaan berikut personil dalam satu organisasi. Suatu unit administrasi atau *administratio* atau unit organisasi dipimpin oleh *administrator* yang bertanggungjawab kepada pemilik atau *master* yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya.

Sebab jika pemilik harta kekayaan atau wakil datang untuk memeriksa keberesan manajemen, maka yang diperiksa adalah keberesan tatausaha. Jika tata usaha beres, maka manajemennya pun beres dalam hal mana tatausaha dipergunakan sebagai cermin manajemen. Dengan kata lain, maka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada magister, maka administrator melakukan *administer* (melayani dengan kebijakan yang ditentukan magister sambil dia menjalankan *administrare* (menyelenggarakan tatausaha yaitu registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, kearsipan) untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Tugas administrator adalah melayani atau mentaati, melaksanakan *administrare* atau tatausaha (registrasi, dokumentasi, inventarisasi atau pencatatan harta kekayaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan) dan *administro* atau memimpin dan mengarahkan personil yang dipercayakan.

**a. Administrasi dalam Arti Sempit**

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatusaha (*clerical work, office work*). Berikut ini dikemukakan beberapa arti administrasi dalam arti sempit atau tatusaha.

Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (*the handling*) informasi (Atmosudirjo, 1980:24). Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatusaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan (Wajong, 1962:53).

Menurut Ali Mufiz yang dikutip dari pendapat Reksohadiprawiro (1984:94) mengemukakan bahwa :

Administrasi berarti tatusaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Oleh karena kegiatan tatusaha merupakan pengelolaan data dan informasi yang keluar dan masuk ke organisasi, maka keseluruhan rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas : penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi.

Adapun tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ketatausahaan berlangsung disebut kantor, yaitu suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan dan operasi pengelolaan informasi. Kegiatan tersebut dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu :

a) Korespondensi (*correspondence*)

Korespondensi atau surat menyurat yaitu rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai kepada pihak yang dituju.

b) Ekspedisi (*expedition*)

Ekspedisi yaitu aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Ini dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui atau pembuktian bahwa suatu informasi yang dibutuhkan sudah dikirim atau diterima.

c) Pengarsipan (*filling*)

Pengarsipan yaitu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dan cepat ditemukan setiap diperlukan. Informasi yang dimaksud dapat berupa warkat (*record*) yaitu catatan-catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan tentang sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat untuk membantu ingatan.

Seluruh kegiatan di atas yang merupakan kegiatan tatausaha (administrasi dalam arti sempit) dipandang sebagai pekerjaan intern yang melibatkan manusia serta

sarana dan prasarana ketatausahaan dalam rangka kerjasama yang dimaksudkan untuk tercapainya tertib administratif dalam hal informasi sehingga akan memperlancar arus informasi (*information flow*) khususnya, baik dalam proses komunikasi (*communication process*) maupun dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*).

**b. Administrasi dalam Arti Luas**

Pengertian administrasi dalam arti luas, berasal dari kata "*administration*" yang menurut beberapa pakar dijelaskan antara lain sebagai berikut :

Newman (1993:4), mengemukakan "*Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of individuals toward some common goal*" (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama).

Siagian (1992:2) mendefinisikan administrasi sebagai berikut :

Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdayaguna dan berhasil guna.

Menurut Silalahi (1992:4) yang mengemukakan bahwa administrasi yaitu

Isi dan hakekat yang terkandung di dalam administrasi tidak mungkin bisa dimengerti tanpa membahas masalah-masalah organisasi dan manajemen. Pada gilirannya, pembahasan mengenai organisasi akan dan bahkan harus membahas manajemen. Sebaliknya membahas manajemen dengan sendirinya tidak lepas dari pembahasan masalah organisasi. Oleh sebab itu organisasi dan manajemen dianggap sebagai dua sisi dari satu mata uang logam yang sama, sedangkan mata uang tersebut dianggap sebagai administrasi.

Adapun Lembaga Administrasi Negara (2003:3) administrasi merupakan sistem yang telah dipraktekan dalam setiap upaya kerjasama manusia secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu dalam perkembangannya administrasi

dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sebagai ilmu (*science*) atau disiplin dan sebagai seni (*art*) atau sistem.

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh beberapa orang yang bekerjasama, maka diperlukan suatu proses yang dinamakan administrasi. Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Berkaitan dengan pengertian administrasi seperti dikutip Akadun (2007:36) yang antara lain : Gie menyatakan bahwa “segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan Soetarto dan Soewarno menyatakan bahwa administrasi adalah “suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan uraian dan definisi dari berbagai pakar administrasi di atas maka dapat disimpulkan beberapa ciri pokok administrasi, yaitu :

- a) Adanya sekelompok orang, bahwa administrasi hanya mungkin terjadi apabila dilakukan lebih dari satu orang.
- b) Adanya kerjasama, artinya administrasi hanya mungkin terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama.
- c) Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan hanya kegiatan kerjasama melainkan kerjasama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
- d) Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.

- e) Adanya tujuan, bahwa kegiatan administrasi itu ada sesuatu yang hendak dicapai melalui proses kerja sama.

Tidak cukup itu saja keberhasilan administrasi dalam organisasi. Dibutuhkan seseorang yang mengatur, menggerakkan dan mengelola agar tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik, proses itu dinamakan manajemen sedangkan orangnya disebut manajer, manajer yang baik adalah manajer yang biasa menjalankan fungsi-fungsi dengan baik, serta menggunakan sumber-sumber dan alat-alat yang dimiliki (6M) *Man, Money, Method, Material, Machine dan Market*. Salah satu unsur penting tersebut adalah **Man** (manusia), sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja.

## **2. Ruang Lingkup Kajian Administrasi Negara**

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Banyak sekali definisi mengenai administrasi, sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi yang merupakan pembeda apakah suatu kegiatan itu merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, dapat dikelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau administrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, salah satu diantaranya adalah administrasi negara.

Pengertian administrasi secara umum, dalam aktualisasinya dapat dilakukan terhadap berbagai bidang kegiatan, sehingga lahir konsep-konsep antara lain seperti administrasi negara. Konsep administrasi negara juga dikemukakan oleh pakar melalui pernyataan beraneka ragam.

Administrasi negara didefinisikan oleh Atmosudirjo (1995:28), sebagai “kepengurusan pemerintahan dari negara sebagai organisasi modern” yang tercermin dalam hal-hal berikut :

- a. Sebagai suatu fungsi pemerintah untuk mengurus dan menangani urusan-urusan kenegaraan (*public*) secara tertentu.
- b. Administrasi publik sebagai suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintah negara.
- c. Administrasi publik sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam tugas dan urusan pemerintah secara terorganisir, sistematis, metodelis teknis.

Suradinata (1996:1) mengartikan bahwa administrasi negara yaitu : Segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu administrasi publik mencakup berbagai aspek kegiatan termasuk proses suatu “*species*” Dalam lingkup pemerintahan yang mempunyai makna sebagai kegiatan manusia yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Istilah administrasi negara memiliki berbagai macam definisi namun apabila ditelaah, definisi-definisi tersebut diangkat dari dua pola pemikiran berbeda. Pola pertama memandang administrasi negara suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) seperti diungkapkan oleh Willoughby (dalam Hamdani, 1997:7) yaitu : ‘*Administration function of actuality administering by the judicial branches of government*’ dalam arti bahwa Administrasi Publik hanya berkaitan dengan fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR.

Pola kedua memandang administrasi negara sebagai keseluruhan aktivitas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Caiden (dalam Hamdani, 1997:8), sebagai berikut :

Administrasi negara adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan juga perlu perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses yang dilakukan melalui kerjasama dalam mencapai tujuan pemerintah (negara). Dalam aktualisasi publik Indonesia, sering kali istilah negara yang dapat diartikan ke dalam pemerintahan, dalam hal ini nampak terkait antara peran pemerintah dalam melaksanakan peran pelayanan publik.

#### **B. Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara**

Istilah administrasi menurut Siagian (2013: 2) adalah sebagai “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Pada sisi lain, Suganda (2010: 15) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi sebagai berikut, Administrasi adalah seluruh proses organisasi dalam penentuan sasaran dan pencapaian dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui cara bersama-sama dengan orang lain secara terkoordinasi dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, eksekusi, pengorganisasian, persuasi, kepemimpinan dan penelitian.

Pendapat dari Simon yang dialih bahasakan oleh Handayani (2011: 21) yaitu *Administration as the activities of group cooperating to accomplish common*

*goals*. Definisi-definisi administrasi dari para ahli di atas harus mengandung faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya kelompok orang-orang yang terdiri dari dua orang atau lebih
2. Ada kerjasama diantara orang-orang tersebut
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada kegiatan yang diproses

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi negara sebagai salah satu aspek kegiatan pemerintahan. Atmosudirjo (Iskandar, 2005: 54) mengemukakan pendapatnya bahwa administrasi negara adalah organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan.

Siagian (Iskandar, 2015: 54) mengemukakan pendapatnya mengenai administrasi negara, yaitu sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suradinata (2016: 1) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi negara sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi.

Adapun ciri-ciri yang membedakan administrasi negara dengan institusi-institusi lainnya menurut Iskandar (2012: 197-199) adalah:

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari
2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan dari setiap penduduk dan warga negara di wilayah tersebut.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas untuk mengatur pelayanan kepada masyarakat.

4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas dalam lingkup kegiatannya.
5. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik.
6. Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur.
7. Banyaknya hal-hal yang diharapkan oleh administrasi negara.

Administrasi merupakan kegiatan yang sangat luas dalam menyelenggarakan negara sebagaimana dikemukakan Warsito (Tachjan, 2006: 7) yaitu penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi harus menjadi satu kesatuan dengan penyelenggaraan manajemen. Penyelenggara administrasi sering disebut dengan administrator dan penyelenggara manajemen disebut manajer. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena administrasi memiliki peran sebagai proses dan manajemen memiliki peran sebagai alat yang harus bergerak dalam suatu wadah yaitu organisasi.

Secara khusus administrasi negara untuk Indonesia telah didefinisikan LANRI (2001: 87) yaitu Administrasi Negara Republik Indonesia adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan Negara Indonesia dan terlaksananya tugas pemerintah Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian administrasi menurut Dimok (Iskandar, 2005: 16), administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan.

Selanjutnya Dimok (Iskandar, 2015: 20) menambahkan bahwa administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui

pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Proses administrasi negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari cara pendekatannya, apabila ditinjau dari sisi penyelenggaraan pemerintah maka akan dapat dikatakan merupakan proses organisasi dan manajemen dari manusia dan benda serta lingkungan untuk mencapai tujuan pemerintah. Dan dalam prosesnya administrasi negara dibutuhkan untuk mengatur proses pencapaian tujuan negara.

Dalam banyak hal, administrasi negara memang berbeda dengan swasta, yang menurut Iskandar (2012: 195-196) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan swasta.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya.
- d. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat harga pasar dan untung-rugi.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara terutama negara dalam negara demokrasi ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak.

Administrasi negara sebagai suatu ilmu, seperti juga ilmu-ilmu lainnya senantiasa terus berkembang. Perkembangan pemikirannya dapat dilihat dalam teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau perlatihan analisis dan arah perhatian dan metodologinya, walaupun perkembangan pemikiran tersebut tahapan maupun lingkup bahasanya tidak terlalu jelas. Secara teoritis, administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas dasar administrasi negara (*Principles of public*

*administration*), organisasi kepegawaian negeri (*civil servant*), dan hukum administrasi (*administrative law*).

Teori administrasi negara yang semula cakupannya terbatas pada perencanaan, organisasi, koordinasi, pengelolaan dan evaluasi telah memasuki bidang pengambilan keputusan kebijakan yang menentukan arah dan sifat warga masyarakat yang dikelola, termasuk di dalamnya menyangkut persoalan-persoalan arah pembangunan yang bertumpu pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam ikut serta menentukan perencanaan pembangunan. Perkembangan administrasi negara selanjutnya yang didasarkan pada interpretasi kontemporer membahas cakupan perspektif baru yang lebih mendalam, seperti perubahan asumsi dasar (*basic premises*) teori administrasi negara, yaitu dari sekedar pelaksanaan kebijakan menjadi bagian yang menyusun kebijakan (Ramto, 1991: 29-31).

Thoha (2012: 9) mengemukakan bahwa persoalan administrasi negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Ilmu administrasi negara secara sensitif harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kedalam realisasi kerja sehari-hari. Administrasi negara seharusnya tidak lagi dipertimbangkan sebagai administrasi dan negara, melainkan administrasi untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pembangunan administrasi diarahkan kepada semakin terciptanya administrasi yang mampu menjamin percepatan, kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kehidupan masyarakat. Dimensi lain administrasi negara adalah upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya aparatur pemerintah agar lebih profesional, handal, efektif, efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta respon terhadap dinamika proses lingkungan strategis.

Peranan ilmu administrasi bagi pembangunan pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara merupakan *condition sine quanon*, karena keberhasilan membangun di berbagai bidang kehidupan selalu membutuhkan dukungan sistem administrasi yang berhasil guna dan berdaya guna seperti yang dikemukakan oleh Fathoni (2016: 2). Namun keberhasilan administrasi tidak bisa lepas dari dukungan ilmu pengetahuan lainnya.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut, penulis meduga perlu mengkaji lebih lanjut hubungan sebab akibat diantara fakta-fakta fenomena masalah tersebut sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul "*Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang*".

### **C. Tinjauan Setiap Variabel**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana BOS**

BOS yang dimaksud adalah program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (BALITBANG

DEPDIKNAS). Yang menjadi prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan untuk biaya investasi.

**a. Mekanisme Alokasi Dana BOS**

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM propinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi.
- c. Tim PKPS-BBM Propinsi dan Tim Kabupaten/kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kab/kota, Kepala Kandepag kab/kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- e. Tim PKPS-BBM kab/kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM propinsi, tembusan ke Pos / Bank dan Sekolah penerima BOS. Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua priode tahun pelajaran yang berbeda.

**b. Pengambilan dan pembatalan Dana BOS**

1) Pengambilan Dana BOS

- a. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada kantor Pos atau Bank Pemerintah.
- b. Selanjutnya kantor Pos / Bank pemerintah yang ditunjuk mentrasfer dana sekaligus kesetiap sekolah.
- c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi

2) Pembatalan Dana BOS

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar maka

bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke kas negara. Tim PKPS-BBM kabupaten atau kota bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS.

**c. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Dana BOS**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada di larangnya suatu perbuatan.

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Oleh karena hal tersebut pisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah: “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Segi subjektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah "tindak pidana"

haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atautkah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat

Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana "(*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

#### **d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana BOS**

Adapun prinsip pengelolaan keuangan sektor publik/ organisasi pendidikan) termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut Abdul Halim adalah:

1. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
2. Value For Money (anggaran berbasis kinerja)
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian (Abdul Halim, 2007:32-33)

Adapun menurut Mardiasmo menyatakan ada tiga prinsip dalam pengelolaan keuangan sektor publik/ organisasi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, adalah bahwa pengelolaan keuangan harus terbuka baik kepada masyarakat, pengawas, dll
2. Akuntabilitas, adalah bahwa pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
3. Rasional, adalah bahwa penggunaan anggaran harus masuk akal. (Mardiasmo, 2002: 105).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semua proses harus dijalankan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan sekolah. Menurut Sahdan, (2012: 23) pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan, merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dan memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/ perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut, artinya dalam mengelola dana BOS tentunya perencanaan pengeluaran anggaran harus ditentukan dengan jelas.
2. Pelaksanaan, semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Pengawasan, adalah proses penggunaan dana, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dikontrol oleh beberapa pihak terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
3. Pertanggungjawaban, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki peran serta aktif dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban dana yang dipakai agar lebih transparan.

Dari prinsip-prinsip pengelolaan tersebut diatas dapat dijadikan ukuran untuk mengukur pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan termasuk di sekolah adapun pengelolaan keuangan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja pegawai dalam organisasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik/ maka dipastikan kinerja pegawai akan meningkat dan sebaliknya. Hal itu sejalan dengan pendapat Waluyo

yang menyatakan bahwa “Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target pengelolaan keuangan/ anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran” (Waluyo, 2007:228).

## **2. Tinjauan Umum Tentang Transparansi Anggaran**

### **a. Pengertian Transparansi Anggaran**

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Imam S. Tunggal dan W. Tunggal (2002: 7) transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan

menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan daerah bersih, efektifitas, efisiensi, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009: 19) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

- 1) Informatif (*informativeness*)  
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) Keterbukaan (*openess*)  
Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Pengungkapan  
Pengungkapan kepada masyarakat atau public (*stakeholders*) Atas aktivitas dan kinerja finansial.

#### **b. Prinsip Dasar Transparansi**

Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Guru**

#### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Smith dalam (Mulyasa, 2005: 136) menyatakan bahwa kinerja adalah “.....*output drive from processes, human or otherwise*”. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kinerja atau *performance* dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja.

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Menurut Prawirasentono (1999: 2):

*Performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”.

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik.

Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan.

## **b. Pengertian Kinerja Guru**

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar kinerja guru Sahertian sebagaimana dikutip Kusmianto (1997: 49) dalam buku panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa:

Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan yang aktif dari guru”

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru.

Pendapat lain diutarakan Soedijarto (1993) menyatakan ada empat tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu: (1) merencanakan program belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses belajar mengajar; (4) membina hubungan dengan peserta didik. Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas tambahan.

Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester maupun persiapan mengajar. Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. *Georgia Departemen of Education* telah mengembangkan *teacher performance assessment instrument* yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana pembelajaran (*teaching plans and materials*) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat pada saat guru menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi dalam melaksanakan pembelajaran yang baik seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik agar pada saat melaksanakan pembelajaran dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran yang terdapat pada indikator keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai pada tahap akhir pembelajaran yaitu pelaksanaan evaluasi dan perbaikan untuk siswa yang belum berhasil pada saat dilakukan evaluasi.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan definisi konsep kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan siswanya.

**c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Malthis dan Jackson (2001: 82) dalam Wikipedia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

- 1) Kemampuan mereka.
- 2) Motivasi.
- 3) Dukungan yang diterima.
- 4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan.
- 5) Hubungan mereka dengan organisasi

Adapun menurut Menurut Gibson (1987) masih dalam Wikipedia menjelaskan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja.

“Tiga faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor individu (kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang).
- 2) Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja).
- 3) Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan atau *reward system*)”.

Penjelasan lain mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dijelaskan oleh Mulyasa. Menurut Mulyasa (2007: 227) sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal:

“Kesepuluh faktor tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja, (2) tanggung jawab terhadap tugas, (3) minat terhadap tugas, (4) penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk berkembang, (6) perhatian dari kepala sekolah, (7) hubungan interpersonal dengan sesama guru, (8) MGMP dan KKG, (9) kelompok diskusi terbimbing serta (10) layanan perpustakaan”.

Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya (2004: 10) tentang faktor yang mempengaruhi kinerja guru.

“Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kesejahteraan guru. Kepuasan ini dilaterbelakangi oleh faktor-faktor: (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, faktor-faktor yang menentukan tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain: (1) tingkat kesejahteraan (*reward system*); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) desain karir dan jabatan guru; (4) kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri; (5) motivasi atau semangat kerja; (6) pengetahuan; (7) keterampilan dan; (8) karakter pribadi guru.

#### d. Penilaian Kinerja

Dwi Sulisworo dalam bukunya “Manajemen dan Evaluasi Kinerja Lembaga Pendidikan dengan Balanced Score Card” menyatakan bahwa pendapatnya mengenai aspek-aspek untuk mengukur kinerja, sebagai berikut:

- a. Efektivitas, adalah dimana akan menjawab apakah lembaga pendidikan telah menyelenggarakan sesuatu yang benar (doing the riht things).
- b. Efisiensi, adalah dimana akan memberikan jawaban bahwa lembaga pedidikan telah dijalankan dengan benar (doing thigs right).
- c. Kualitas, adalah dimana akan memberikan jawaban bahwa layanan akademik telah memenuhi persyaratan dan harapan peserta didik dan pengguna lulusan.
- d. Waktu, ukuran dimana satuan aktivitas dijalankan dengan benar pada waktu yang telah ditentukan.
- e. Produktivitas, adalah nilai tambah yang dihasilkan dari proses akademik terhadap sumber daya yang digunakan.
- f. Safety, adalah ukuran keseluruhan kesehatan organisasi dan lingkungan kerja bagi peserta didik dan staf lembaga pendidikan. (Dwi Sulisworo, 2010:3-4).

Keenam aspek tersebut daat dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang atau sekelompok orang dala melaksanakan tugasnya terutama di lembaga pendidikan. Selanjutnya Agus Darma berpendapat ada tiga aspek dalam pengukuran kinerja yaity sebagai berikut:

- a. Kuantitas, adalah jumlah yang harus diselesaikan oleh karyawan/ pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan oleh karyawan/ pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. (Agus Dharma: 1991: 45)

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat kinerja guru yang lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hani Handoko (1994: 135) menjelaskan bahwa, “penilaian prestai kerja (*performance appraisal*) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. Penilaian

kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai instrumen utama, yaitu skala penilaian dan lembar observasi atau penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai.

#### **D. Hubungan Antar Variabel**

Pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan maka dapat dipastikan kinerja pegawai akan meningkat dan sebaliknya. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target pengelolaan/ keuangan atau anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Selain itu, kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang efisien atau mengelola anggaran yang efisien.

Begitupula dengan pengelolaan keuangan dalam manajemen pendidikan dalam hal ini sekolah, yang memiliki hubungan dan pengaruh yang positif antara pengelolaan keuangan dengan kinerja guru khususnya. Sehingga jelaslah bahwa

anggaran merupakan salah satu proses dalam pengelolaan keuangan menuntut atau menekankan pada kinerja (Performance) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan suatu program.

SMK Thursina Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari manajemen pendidikan, sehingga dalam menentukan anggaran/ pengelolaan keuangan harus dapat meningkatkan kinerja pegawainya terutama guru yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai misi organisasi pendidikan khususnya di SMK Thursina. Setiap pengelolaan anggaran yang dialokasikan harus dapat meningkatkan kinerja guru. Termasuk didalamnya anggaran yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dialokasikan sebagianya untuk meningkatkan kinerja guru terutama yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan atau peningkatan profesionalisme guru. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ada beberapa indikasi kinerja guru menurun akibat keterlambatan dan kurangnya transparansi pihak pengelola BOS.

Namun, keterlambatan BOS tersebut bukan semata-mata kesalahan dari pihak pengelola akan tetapi keterlambatan disebabkan oleh pemerintah dalam menyalurkan dana BOS. Dengan keterlambatan tersebut guru merasa tidak memiliki semangat kerja sehingga kinerja mereka menurun akibatnya jika dibiarkan berlarut-larut kinerja guru akan semakin rendah. Sehingga jelaslah bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan transparansi

anggaran, apabila pengelolaan keuangan terbuka, efektif dan efisien maka kinerja guru akan meningkat begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khususnya pengawasan melekat dari kepala sekolah kepada pihak pengelola keuangan/ bendahara terutama keuangan yang berasal dari dana BOS, karena sampai saat ini sumber dana yang terbesar dan kontinue dari dana BOS. Untuk lebih jelasnya berikut adalah beberapa definisi hubungan antar variabel pada penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

**a. Variabel Pengelolaan dana BOS terhadap kinerja guru**

Bos dikelola oleh SD/ SDLB/ SMP/ SMPLB/ SMK/ SMA/ dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pengelolaan BOS melibatkan pihak guru dan komite sekolah. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan. Menurut Stoner (dalam Kaho, 2015:228) manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni proses: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan penagawasan. Maka pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu dalam hal ini kinerja pegawai termasuk guru di sekolah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan itu dapat didefinisikan sebagai pekerja dengan organisasi-organisasi

untuk menentukan maupun mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan personalia), *Directing* (pengarahan), *controlling* (pengawasan). Ada tiga pokok penting dalam pengertian tersebut yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang dicapai menggunakan kegiatan orang lain dan kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Manajemen juga menggunakan aktivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen tersebut adalah *planning, organizing, staffing, directing dan controlling*.

#### **b. Variabel Transparansi Terhadap Kinerja Guru**

Karakteristik anggaran adalah kejelasan/ transparansi anggaran, dengan adanya transparansi anggaran di dalam organisasi akan memberikan dan meningkatkan pengawasan. Transparansi juga merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Imam S. Tunggal (2002: 7) “Transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses)”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi berkaitan erat dengan kinerja guru, karena tidak akan mungkin guru akan memiliki kinerja yang baik tanpa adanya transparansi didalam pengelolaan keuangan pada khususnya. Apalagi didalam juknis BOS terdapat komponen-komponen pembiayaan untuk

meningkatkan kinerja guru seperti pelatihan, peningkatan mutu, pengadaan media pembelajaran dan lain-lain.

**c. Variabel Pengelolaan BOS dan Transparansi Anggaran**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen termasuk juga dalam pengelolaan keuangan atau dana BOS di sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik salah satunya adalah harus transparan (terbuka) karena merupakan bagian dari *good governance*. Ada beberapa definisi transparansi diantaranya, Lalolo (2003:13) menyatakan bahwa “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai”. Mustopa Didjaja (2003 :261) menyatakan bahwa “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat”. Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), menyatakan bahwa “Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Dari beberapa definisi dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan sekali transparansi bahkan sifatnya sangat urgent dan sensitif sekali sehingga hubungan antara pengelolaan keuangan dan transparansi sangat erat dan timbal balik.

### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan merupakan suatu bahan kajian yang dapat dibandingkan maupun dikaji mengenai hasil yang diharapkan terhadap hubungan antar variabel.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	<p><i>“EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH NEGERI DI KECAMATAN PALU TIMUR”</i></p> <p><b>Peneliti:</b> Nurmala Sari Soulisa</p> <p><b>Lokasi:</b> Universitas Tadulako Palu</p> <p><b>Tahun:</b> 2019</p>	<p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar di Kabupaten Palu Timur. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Sektor Pendidikan Dasar, Kepala Sub-Administrasi Program dan perencanaan, kepala sekolah di SDN 24 Palu, Kepala Sekolah di SDN 15 Palu, Komite Sekolah, dan orang tua. Data penelitian adalah data primer dan sekunder data. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini penelitian menggambarkan dana BOS di sekolah assest menggunakan evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Berdasarkan enam kriteria di atas dapat diketahui bahwa dari tujuan kebijakan dana BOS berjalan dengan baik.</p> <p><u>Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian</u></p> <p>Penelitian ini sangat membantu karena menganalisis kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu. Peneliti telah menggambarkan implementasi kebijakan BOS di Kota Palu sehingga bisa menjadi bahan perbandingan kepada penelitian yang relevan</p>

No	Judul Penelitian	Pembahasan
		yaitu dengan judul penelitian “ <i>Pengaruh Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina</i> ”
2.	<p><b>Judul Jurnal:</b>  “<i>Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung</i>”</p> <p><b>Peneliti:</b>  Nur Azizah Fauziyyah</p> <p><b>Lokasi: Bandung</b>  <b>Tahun: 2018</b></p> <p><b>Nama Jurnal:</b>  <i>Jurnal Pendidikan Akutansi dan Keuangan</i></p>	<p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Sehingga semua populasi akan dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efektivitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) se-kota Bandung tergolong cukup efektif dengan presentase 88,67 %.</p> <p><u>Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian</u></p> <p>Jurnal ini berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif sehingga mampu menggambarkan keseluruhan implelementasi kebijakan BOS di SMK.</p>
3.	<p><b>Judul:</b>  <i>Pengembangan Kinerja Guru</i></p> <p><b>Peneliti:</b>  Bridget Nawikala</p> <p><b>Lokasi UPI Bandung</b>  <b>Tahun: 2012</b></p> <p><b>Nama Jurnal</b>  <i>Penelitian Pendidikan UPI</i></p>	<p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>dengan menggunakan studi survei, penelitian ini melibatkan dua variabel independen yaitu : pelatihan guru dan hubungan manusiawi serta satu variabel dependen yaitu : kinerja mengajar guru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah; studi dokumentasi serta kuesioner. populasi sebanyak 175 terdiri dari para guru sekolah meenngan pertama dan tiga sekolah yang diseleksi dengan tiga tatanan sekolah yang berbeda yaitu : (1) sekolah menengah pertama BPK Penabur, (2) Sekolah Menengah Perama Negeri 2, (Sekolah Menengah Pertama Negeri 12, semuanya berlokasi di Bandung. Sample penelitiannya sebanyak 64 para guru. pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive samling. data dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan korelasional.</p>

No	Judul Penelitian	Pembahasan
		<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru, pelatihan guru dan hubungan manusiawi dikategorikan bagus</p> <p><u>Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian</u></p> <p>Jurnal ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh-pengaruh tertentu untuk meningkatkan kinerja guru. Sehingga sangat dibutuhkan oleh penulis untuk membantu mengembangkan penelitian tentang kinerja guru.</p>
4.	<p><b>Judul:</b> <i>Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di DKI Jakarta</i></p> <p><b>Peneliti:</b> Drs. Budi Santoso, M.Si</p> <p><b>Lokasi:</b> SMP Negeri Jakarta</p> <p><b>Tahun:</b> 2007</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> <i>Jurnal Pendidikan UPI Bandung</i></p>	<p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil sebagai berikut. Secara parsial variabel pelatihan berpengaruh terhadap kinerja guru, variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru, Secara bersama-sama variabel pelatihan dan variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengembangan pada variabel pelatihan dan budaya organisasi memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja guru widyaiswara yang ditunjukkan oleh perolehan angka kredit</p> <p>Berdasarkan hasil analisis dapat direkomendasikan bahwa 1) peluang yang sama perlu diberikan kepada setiap guru untuk mengikuti pelatihan, sehingga kemampuan profesionalitas guru relatif merata, 2) tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada guru perlu lebih disesuaikan dengan pendidikan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki guru, dan 3) diperlukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelatihan dan budaya organisasi, sehingga dapat kinerja guru dapat lebih meningkat.</p> <p><u>Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian</u></p> <p>Penelitian ini membahas apa saja pengaruh yang menyebabkan kinerja guru meningkat sehingga penulis merasa tertarik untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini karena ada point yang sangat penting yaitu adanya pelatihan-pelatihan</p>

No	Judul Penelitian	Pembahasan
		akan meningkatkan kinerja guru sedangkan pelatihan-pelatihan dapat dibiayai oleh dana BOS sehingga merasa perlu untuk dibandingkan dan menjadi rujukan penelitian dengan judul : <i>"Pengaruh Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang"</i> .



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pendekatan deskriptif analisis, yaitu agar ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel. Menurut Iskandar (2005: 174): “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena dan biasanya metode ini menggunakan teknik survei”. Pendekatan kuantitatif melalui korelasi sederhana dan korelasi ganda. Analisis ini akan digunakan dalam menguji besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi antar variabel pengelolaan dana BOS ( $X_1$ ), transparansi anggaran ( $X_2$ ) terhadap kinerja guru ( $Y$ ). Adapun objek dan lokasi penelitiannya adalah guru SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket.

Menurut Sugiyono (2012: 38) pengertian objek penelitian yaitu “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Pendapat lain, menurut Made (2006: 39), “Objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari suatu nilai” Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif mengenai pengaruh pengelolaan dana BOS dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang. Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variabel bebas (*independent variable*) adalah pengelolaan dana BOS dan transparansi anggaran, sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah kinerja guru SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini juga menuntut ketelitian, ketekunan dan sikap kritis dalam menjaring data dari sumbernya, untuk itu diperlukan kejelasan sumber data yaitu populasi dan sampel dari sisi homogenitas, volume dan sebarannya. Karena data hasil penelitian berupa angka-angka yang harus diolah secara statistik, maka antar variabel-variabel yang dijadikan objek penelitian harus jelas korelasinya sehingga dapat ditentukan pendekatan statistik yang akan digunakan sebagai pengolah data yang pada gilirannya hasil analisis dapat dipercaya (reliabilitas dan validitas), dengan demikian mudah untuk digeneralisasikan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan yang cukup akurat. Sugiyono (2009: 12-13), penelitian kuantitatif didasarkan kepada paradigma positivisme berdasarkan pada asumsi mengenai objek empiris, asumsi tersebut adalah:

- Objek/fenomena dapat diklasifikasikan menurut sifat, jenis, struktur, bentuk, warna dan sebagainya. Berdasarkan asumsi ini maka penelitian dapat memilih variabel tertentu sebagai objek penelitian.
- Determinisme (hubungan sebab akibat), asumsi ini menyatakan bahwa setiap gejala ada penyebabnya.

Berdasarkan asumsi pertama dan kedua tersebut, maka penelitian dapat memilih variabel yang diteliti dan menghubungkan variabel satu dengan yang lainnya. Suatu gejala tidak akan mengalami perubahan dalam waktu tertentu, kalau gejala yang diteliti itu berubah terus maka akan sulit untuk dipelajari.

## **B. Variabel dan Paradigma Penelitian**

### **1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas  $X$  yang diukur dengan notasi  $X_1$  dan  $X_2$ , dan variabel terikat dengan notasi  $Y$ . Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel bebas pertama yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( $X_1$ ). Pendekatan teori yang digunakan untuk mengungkap variabel bebas ini adalah teori dari Sahdan (2012) dengan indikator:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Pertanggungjawaban

b. Variabel bebas kedua yaitu transparansi anggaran ( $X_2$ )

Variabel bebas ini adalah teori transparansi anggaran ( $X_2$ ). Variabel bebas menggunakan pendekatan teori Mardiasmo (2009: 19) dengan indikator:

1. Informatif
2. Keterbukaan
3. Pengungkapan

c. Variabel terikat yaitu kinerja guru (Y).

Pendekatan teori yang digunakan untuk mengungkap variabel ini adalah teori kinerja menurut Kusmianto (1997: 49), dengan dimensi yang akan diukur sebagai berikut:

- 1) Bekerja dengan siswa secara individual
- 2) Persiapan dan perencanaan pembelajaran
- 3) Pendayagunaan media pembelajaran
- 4) Melibatkan siswa dalam pengamalan belajar
- 5) Kepemimpinan yang aktif

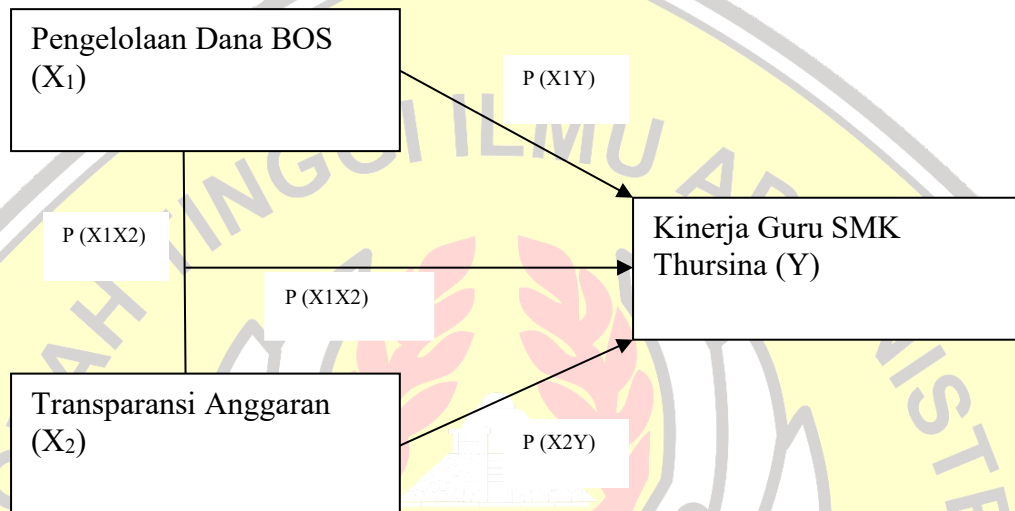
## **2. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dengan paradigma tersebut, maka akan dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan masalah penelitian, merumuskan hipotesis dan menentukan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Untuk memperjelas substansi penelitian, maka variabel penelitian yang akan diukur terlebih dahulu disusun dan digambarkan dalam suatu paradigma penelitian. Melalui paradigma ini, maka kegiatan penelitian relatif akan lebih mudah dilakukan sehingga hasil penelitian yang dilakukan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pengaruh atau hubungan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten

Sumedang. Hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Paradigma Penelitian**



## A. Definisi Operasional dan Operasionalisasi Variabel

### 1. Definisi Operasional

Berdasarkan variabel yang telah ditentukan dan model penelitian, maka definisi operasionalisasi variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas pertama yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( $X_1$ ). Pendekatan teori yang digunakan untuk mengungkap variabel bebas ini adalah teori Sahdan (2012).
2. Variabel bebas kedua adalah transparansi anggaran ( $X_2$ ). Variabel bebas ini menggunakan teori Mardiasmo (2009).
3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja guru SMK Thursina ( $Y$ ). Pendekatan teori yang digunakan untuk mengungkap variabel ini adalah teori penilaian kinerja menurut Kusmianto (1997: 49).

## 2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara menjelaskan pengertian konkrit dari setiap variabel tersebut, sehingga dimensi indikator dan pengukuran dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item	
<b>Pengelolaan (X<sub>1</sub>) Sahdan (2012)</b>	1. Perencanaan	1. Keterlibatan Publik	1	
		2. Keterlibatan Aparat	2	
		3. Keterlibatan warga sekolah	3	
		4. Kerjasama	4	
	2. Pelaksanaan	1. Terbuka	5	
		2. Efektif	6	
	3. Pengawasan	3. Efisien	7	
	4. Pertanggungjawaban	1. Sistematis	8,9	
		2. Berkala	10	
		1. Kepada pemerintah	11	
		2. Kepada warga sekolah 3. Kepada Masyarakat	12 13	
	<b>Mardiasmo (2009:19)</b> <b>Transparansi Anggaran</b>	1. Informatif	1. Ketepatan waktu	14
			2. Memadai	15
3. Jelas			16,17	
4. Akurat			18	
5. Dapat diperbandingkan			19	

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
		6. Mudah diakses	20
	2.Keterbukaan	1.Hak memperoleh informasi	21
		2.Data di badan publik	22
		3.Informasi terbuka	23
	3.Pengungkapan	1.Kondisi keuangan	24
		2.Susunan pengurus	25
		3.Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan	26,27
<b>Kinerja Guru (Y)</b> <b>(Kusmianto,1997:49)</b>	Ukuran Kinerja Guru:		
	1.Bekerja secara individual	1. Bekerja secara individual	28
		2. Kerjasama dengan siswa	29
	2.Persiapan dan perencanaan pembelajaran	1. Persiapan administrasi yang matang	30
		2. Persiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik	31
	3.Pendayagunaan media pembelajaran	1. Pemanfaatan sumber belajar	32
		2.Penggunaan media untuk mendukung pembelajaran	33
	4.Keterlibatan siswa dalam pengalaman belajar	1.Pembelajaran edukatif	34
		2.Studi banding pembelajaran	35
	5. Kepemimpinan yang aktif	1. Menjadi teladan bagi siswa	36
		2.Menunjukkan sikap kepemimpinan	37
		3. Bijaksana dalam mengambil keputusan	38

#### **D. Alat Ukur Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Pengujian validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk mendapatkan petunjuk mengenai mutu penelitian. Keandalan menunjukkan ketepatan, keman-tapan, dan homogenitas alat ukur (*instrument*) yang dipakai.

##### **1. Menguji Validitas**

Validitas suatu alat ukur didefinisikan sebagai sifat suatu ukuran yang memungkinkan peneliti beranggapan bahwa alat ukur itu dapat digunakan untuk mengukur karakter yang hendak diukurinya (Iskandar, 2014: 147). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keakuratan suatu alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu menghasilkan ukuran yang tepat dalam suatu pengukuran masalah tertentu, dan tidak valid untuk pengukuran masalah yang lain.

Alat ukur yang valid dan akurat mempunyai validitas tinggi, sebaliknya alat ukur yang tidak valid memiliki validitas yang rendah. Pada umumnya validitas alat ukur bergantung pada faktor logika dan pembuktian statistik. Terdapat dua cara uji validitas :

##### **1. Uji Validitas Konseptual**

Uji validitas konseptual digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya (*actually*). Uji validitas konseptual melakukan pengujian terhadap beberapa tipe validitas.

- a. Validitas isi merupakan butir-butir pernyataan pada alat ukur penelitian dirumuskan sebagai penjabaran dari aspek-aspek variabel penelitian. Dilakukan dengan penilaian oleh ahli melalui evaluation

dan instrument yang digunakan dianggap cukup, mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi dan elemen yang menggambarkan konsepnya.

b. Validitas *Concurrent*

Dilakukan dengan tujuan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Validitas Concurrent (serentak) terjadi ketika skala yang ditetapkan dapat membedakan individual yang telah diketahui berbeda sehingga skor untuk masing-masing instrument seharusnya juga berbeda. Diukur dengan koefisien korelasi hasil uji kelompok yang berbeda harus menunjukkan korelasi yang rendah.

c. Validitas konstruk adalah variabel-variabel yang dijabarkan pada alat ukur penelitian bersumber pada teori.

## 2. Uji Validitas Lapangan

Data primer berupa hasil jawaban angket terhadap setiap variabel penelitian yang diperoleh dari sebagian responden melalui uji coba alat ukur penelitian mengenai uji validitas isi dengan jumlah sampel 20. Untuk menguji alat ukur di lapangan yang berupa angket, terlebih dahulu dicari angka korelasi bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan, yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor yang merupakan

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

jumlah skor tiap butir dari alat ukur tersebut dengan menggunakan rumus Korelasi

*Product Moment Pearson.*

Dimana :

$r$  = koefisien korelasi

$n$  = jumlah responden

$\Sigma x$  = jumlah skor tiap item

$\Sigma y$  = jumlah skor total

Setelah dihitung nilai statistik, uji t pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n - 2$  dengan rumus statistik uji :

kebebasan ( $dk$ ) =  $n - 2$  dengan rumus statistik uji :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :  $t$  = nilai hitung

$r$  = koefisien hasil hitung

$n$  = jumlah responden

Kaidah keputusan : bila  $t_{\text{hitung}} > t_{1/2\alpha, n-2} \longrightarrow$  data valid

$t_{\text{hitung}} \leq t_{1/2\alpha, n-2} \longrightarrow$  data tidak valid

Selanjutnya untuk menafsirkan korelasi alat ukur menurut Sugiyono (2010) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2****Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Berikut hasil uji validitas variabel X, X2 dan Y terhadap 20 responden yang dilibatkan dalam penelitian.

**Tabel 3.3****Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana BOS (X1)**

Item	Nilai r hitung	Nilai t hitung	Nilai r tabel (df-2)	t tabel $\alpha = 0,05$	Ket
1	0,674	3.871	0,4438	2,101	Valid
2	0,551	2.801	0,4438	2,101	Valid
3	0,785	5.382	0,4438	2,101	Valid
4	0,644	3.575	0,4438	2,101	Valid
5	0,785	5.382	0,4438	2,101	Valid
6	0,644	3.575	0,4438	2,101	Valid
7	0,674	3.871	0,4438	2,101	Valid
8	0,540	2.719	0,4438	2,101	Valid
9	0,785	5.382	0,4438	2,101	Valid
10	0,644	3.575	0,4438	2,101	Valid
11	0,657	3.702	0,4438	2,101	Valid
12	0,623	3.381	0,4438	2,101	Valid
13	0,799	5.632	0,4438	2,101	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji yang dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan pada variabel pengelolaan dana BOS (X1) termasuk kedalam kriteria valid karena nilai t hitung setiap butir pertanyaan melebihi nilai t tabel (2,101) dalam hal ini t hitung > t tabel. Selanjutnya untuk mengetahui hasil uji validitas Transparansi Anggaran (X2) dapat diketahui dari tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Transparansi Anggaran (X2)**

Item	Nilai r hitung	Nilai t hitung	Nilai r tabel (df-2)	t tabel $\alpha = 0,05$	Ket
1	0.665	3.781	0,4438	2,101	Valid
2	0.688	4.017	0,4438	2,101	Valid
3	0.786	5.394	0,4438	2,101	Valid
4	0.521	2.589	0,4438	2,101	Valid
5	0.655	3.677	0,4438	2,101	Valid
6	0.802	5.699	0,4438	2,101	Valid
7	0.506	2.488	0,4438	2,101	Valid
8	0.665	3.781	0,4438	2,101	Valid
9	0.688	4.017	0,4438	2,101	Valid
10	0.786	5.394	0,4438	2,101	Valid
11	0.521	2.589	0,4438	2,101	Valid
12	0.637	3.506	0,4438	2,101	Valid
13	0.713	4.310	0,4438	2,101	Valid
14	0.642	3.554	0,4438	2,101	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji yang dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan pada variable transparansi anggaran (X2) termasuk kedalam kriteria valid karena nilai t hitung setiap butir pertanyaan melebihi nilai t tabel (2,101) dalam hal ini t hitung > t tabel. Selanjutnya untuk mengetahui hasil uji validitas Variabel Kinerja Guru (Y) dapat diketahui dari tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Uji Validitas Kinerja Guru (Y)**

Item	Nilai r hitung	Nilai t hitung	Nilai r tabel (df-2)	t tabel $\alpha = 0,05$	Ket
1	0.599	3.177	0,4438	2,101	Valid
2	0.528	2.635	0,4438	2,101	Valid
3	0.619	3.342	0,4438	2,101	Valid
4	0.717	4.369	0,4438	2,101	Valid
5	0.915	9.616	0,4438	2,101	Valid
6	0.876	7.704	0,4438	2,101	Valid
7	0.876	7.704	0,4438	2,101	Valid
8	0.940	11.713	0,4438	2,101	Valid
9	0.929	10.628	0,4438	2,101	Valid
10	0.940	11.713	0,4438	2,101	Valid
11	0.876	7.704	0,4438	2,101	Valid

*Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021*

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji yang dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan pada variabel kinerja guru (Y) termasuk kedalam kriteria valid karena nilai t hitung setiap butir pertanyaan melebihi nilai t tabel (2,101) dalam hal ini t hitung > t tabel.

## 2. Menguji Reliabilitas

Menurut (Iskandar, 2014 :166) reliabilitas suatu instrumen pengukuran merupakan suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur. Reliabilitas adalah konsisten atau kemantapan alat-alat ukur dalam mengukur apa yang diukurnya sehingga dengan alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah.

Iskandar (2014) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur penelitian dipercaya atau diandalkan”. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Untuk mengukur reliabilitas kuisioner dalam penelitian ini digunakan rumus “*Cronbanch Alpha*” dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Penentuan nilai korelasi (r) untuk menentukan nilai korelasi, digunakan rumus sebagai berikut :

$$S_i^2 = \frac{Jki}{n} - \frac{Jks}{n^2}$$

$$S_r^2 = \frac{\sum XT^2}{n} - \left( \frac{\sum XT}{n^2} \right)^2$$

$$r = \left\{ \frac{K}{K-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{S1^2}{Sr^2} \right\}$$

Keterangan :

N	= Jumlah responden
K	= Jumlah item (butir pertanyaan)
JK1	= Penjumlahan dari kuadrat seluruh skor tiap item
JKs	= Penjumlahan dari kuadrat jumlah skor tiap item
Xr	= Skor masing-masing responden
R	= Reliabilitas alat ukur
$\sum S1^2$	= Jumlah varian item
$S1^2$	= Varian total
$\sum X$	= Jumlah skor ganjil
r	= Koefisien korelasi

2. Menghitung nilai statistik dengan rumus :

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{\sqrt{t-r^2}}}$$

Keterangan:

- t = Nilai hitung
- r = Koefisien korelasi hasil hitung
- n = Jumlah responden

3. Kaidah keputusan

Bila t hitung  $> (1/2 \alpha, n - 2)$  = alat ukur reliabel

Bila t hitung  $< (1/2 \alpha, n - 2)$  = alat ukur tidak reliable

Adapun hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dapat diketahui dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Dana BOS (X1)**

Item	Varians	Hasil perhitungan	
1	0.340	Varians butir	4,31
2	0.460	Varians total	38,54
3	0.328	Nilai alfa	0,962
4	0.250	t hitung	15,02

Item	Varians	Hasil perhitungan	
5	0.328	t tabel	2,101
6	0.250	Keputusan	Reliabel
7	0.340	Kaidah keputusan :	
8	0.428	Jika t hitung > t tabel : reliabel	
9	0.328	Jika t hitung < t tabel : tidak reliabel	
10	0.250	T tabel $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2 = 20-2 = 18$ diperoleh = 2,101	
11	0.250		
12	0.428		
13	0.328		

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel Pengelolaan Dana BOS (X1) di atas menunjukkan bahwa nilai *alfa cronbach* > 0,60 dan t hitung > t tabel atau  $15,02 > 2,101$  sehingga hasilnya *reliable*.

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Transparansi Anggaran (X2)**

Item	Varians	Hasil perhitungan	
1	0.460	Varians butir	5,39
2	0.448	Varians total	33,20
3	0.410	Nilai alfa	0,902
4	0.340	t hitung	8,88
5	0.228	t tabel	2,101
6	0.590	Keputusan	Reliabel
7	0.248	Kaidah keputusan :	
8	0.460	Jika t hitung > t tabel : reliabel	
9	0.448	Jika t hitung < t tabel : tidak reliabel	

10	0.410	T tabel $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2 = 20-2 = 18$ diperoleh = 2,101
11	0.340	
12	0.428	
13	0.328	
14	0.250	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel Transparansi Anggaran (X2) di atas menunjukkan bahwa nilai *alfa cronbach* > 0,60 dan t hitung > t tabel atau  $8,88 > 2,101$  sehingga hasilnya **reliable**.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji Reliabilita Kinerja Guru (Y)**

Item	Varians	Hasil perhitungan	
1	0.340	Varians butir	4,18
2	0.428	Varians total	29,55
3	0.328	Nilai alfa	0,945
4	0.250	t hitung	12,21
5	0.340	t tabel	2,101
6	0.328	Keputusan	Reliabel
7	0.328	Kaidah keputusan :	
8	0.510	Jika t hitung > t tabel :	reliabel
9	0.488	Jika t hitung < t tabel :	tidak reliabel
10	0.510	T tabel $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2 = 20-2 = 18$	
11	0.328	diperoleh = 2,101	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kinerja Guru (Y) di atas menunjukkan bahwa nilai *alfa cronbach* > 0,60 dan *t* hitung > *t* tabel atau 12,21 > 2,101 sehingga hasilnya *reliable*.

## **E. Populasi dan Instrumen Penelitian**

### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2004:6). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada umumnya pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengelola dan Guru SMK Thursina Kabupaten Sumedang.

Pengertian sampel menurut Riduwan (2010: 56) mengatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari populasi.” Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Untuk sekedar berjaga-jaga maka apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel Nasution (1991:135) bahwa, “.. mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi

statistik), serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya.” Sukardi (2004: 55) mengatakan “untuk penelitian sosial, pendidikan, ekonomi dan politik yang berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai karakteristik heterogen, pengambilan sampel disamping syarat tentang besarnya sampel harus memenuhi syarat keterwakilan (*representativeness*) atau mewakili semua komponen populasi. Atas dasar teori tersebut maka sampel penelitian ini adalah menggunakan sampel total karena populasinya kurang dari 100 yaitu, semua guru SMK Thursina yang berjumlah 18 orang ditambah Tata Usaha 2 orang jadi jumlahnya 20.

## **2. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan sangat tergantung pada jenis data seperti apa yang dibutuhkan, dan data seperti apa yang akan digunakan ditentukan oleh apa rumusan masalah penelitian yang diajukan.

Angket atau kuesioner pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner bisa terdiri atas dua pertanyaan; pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup memberi opsi responden untuk memilih jawaban yang sudah tertulis dalam kuesioner. Pertanyaan terbuka memberi kesempatan pembaca untuk menuliskan jawabannya sendiri. Tidak ada standar baku tentang struktur kuesioner. Namun demikian, kuesioner sedikitnya harus melibatkan pertanyaan tentang identitas dan pertanyaan penelitian.

Perlu dicatat bahwa identitas responden tidak harus identitas sebenarnya. Bahkan pada beberapa penelitian, penulisan nama responden tidak diperlukan demi menjaga kerahasiaan responden dan menegakkan etika riset. Identitas responden yang umumnya dicatat adalah, umur, jenis kelamin, tahun lahir, dan variabel lain yang berguna untuk analisis. Secara singkat data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket dalam sejumlah pertanyaan kepada para responden dan hasil yang di dapatkan kemudian dianalisa mempergunakan teknik analisis data dengan alat SPSS.

Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam skala likert. Menurut Sugiyono (2013: 134) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada skala likert terdapat tujuh skala yang dapat mengukur tingkat agreement subjek, namun penelitian ini akan menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi menjadi empat skala. Empat skala tersebut terdiri dari Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). Berikut adalah tabel yang menggambarkan skor pada setiap skala likert tersebut:

**Tabel 3.9**  
**Pernyataan Positif dan Negatif**

Pernyataan Positif (+)		Pernyataan Negatif (-)	
Alternatif Jawaban	Skor	Alternatif Jawaban	Skor
Selalu	5	Selalu	1
Sering	4	Sering	2
Kadang-kadang	3	Kadang-kadang	3
Pernah	2	Pernah	4
Tidak Pernah	1	Tidak Pernah	5

Sumber : Sugiyono (2013:135)

## F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yang dituangkan dalam pertanyaan terstruktur. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden yang menunjang pembahasan hasil penelitian dengan cara melakukan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan, dilakukan dengan:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan penelitian dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini.
2. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertutup. Angket ini disebarkan kepada kepala sekolah, komite, Tata Usaha, dan guru SMK Thursina Kabupaten Sumedang.
3. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan pegawai atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

- b. Studi Dokumentasi, yaitu suatu upaya memperoleh keterangan ilmiah dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku karya para ahli, karya ilmiah, jurnal dan literatur lainnya.

#### G. Teknis Analisis Data

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian hasil penelitianpun akan segera diketahui. Analisis yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* dan korelasi ganda, namun dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui bantuan komputer dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi *pearson product moment* dan korelasi ganda. Analisis ini akan digunakan dalam menguji besarnya pengaruh variabel  $X_1$ , dan  $X_2$  terhadap  $Y$ . Analisis ini untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana BOS ( $X_1$ ) dan transparansi anggaran ( $X_2$ ) terhadap kinerja guru di SMK Thursina Kabupaten Sumedang ( $Y$ ), baik secara bersama-sama maupun secara individu. Rumus analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) adalah sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2013: 212)

Korelasi PPM dilambangkan ( $r$ ) dengan ketentuan nilai  $r$  tidak lebih dari harga  $(-1 \leq r \leq +1)$ . Apabila nilai  $r = -1$  artinya korelasinya negatif sempurna;

$r = 0$  artinya tidak ada korelasi; dan  $r = 1$  berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga  $r$  akan dikonsultasikan dengan Tabel interpretasi Nilai  $r$  sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai  $r$**

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,80 – 1,000	Sangat Tinggi
0,60 – 0,799	Tinggi
0,40 – 0,599	Cukup Tinggi
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Riduwan dan Sunarto (2010 :138)

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna pengaruh variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi PPM tersebut diuji dengan Uji Signifikansi dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :  $t_{hitung}$  = Nilai  $t$

$r$  = Nilai Koefisien Korelasi

$n$  = Jumlah sampel

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi PPM yang dikalikan dengan 100%. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai

sumbangan atau ikut menentukan variabel Y. Sumbangan dicari dengan menggunakan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai koefisien determinan  
(Pengaruh antar variabel)

r = Nilai koefisien korelasi.

Mengetahui pengaruh antara variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap variabel Y digunakan rumus korelasi ganda sebagai berikut:

$$R_{X_1.X_2.Y} = \sqrt{\frac{r_{X_1.Y}^2 + r_{X_2.Y}^2 - 2(r_{X_1.Y})(r_{X_2.Y})(r_{X_1.X_2})}{1 - r_{X_1.X_2}^2}}$$

Sumber: Riduwan dan Sunarto (2010 :138)

Analisis lanjut digunakan teknik korelasi baik sederhana maupun ganda. Kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa komputer berupa *software* dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) Windows Version 20.

## H. Tempat, Waktu dan Langkah-langkah Penelitian

### 1. Tempat

Tempat penelitian ini adalah SMK Thursina yang terletak di Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

### 2. Waktu

Waktu penelitian ini adalah pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

**Tabel: 3.11**  
**Jadwal Penelitian**

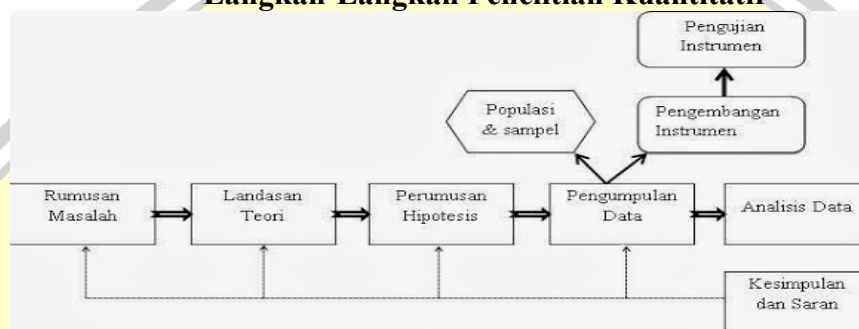
No	Uraian	Maret				April				Mei				Juni				
		Minggu Ke																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Persiapan Penelitian			■	■	■												
2.	Perencanaan Penelitian						■	■										
3.	Pengumpulan Data Objek								■									
4.	Observasi Partisipatif									■	■							
5.	Wawancara (Interview)												■	■				
6.	Pengolahan Data														■			
7.	Penyusunan Laporan															■	■	■

### 3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan dilapangan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persiapan Pengajuan Judul
- b. Penelitian Terdahulu
- c. Pengajuan Rencana Penelitian
- d. Penyusunan Alat Pengumpulan Data
- e. Pelaksanaan Penelitian

**Gambar 3.2**  
**Langkah-Langkah Penelitian Kuantitatif**



Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah langkah-langkah metode penelitian kuantitatif:

- 1) Membuat rumusan masalah

Setiap penelitian harus bersumber dari adanya masalah. Seperti penjelasan di atas tentang desain penelitian dengan metode kuantitatif. Maka penelitian dengan metode kuantitatif memiliki masalah yang jelas. Setelah selesai untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah. Selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah.

- 2) Menentukan landasan teori

Masalah yang sudah dirumuskan menjadi rumusan masalah. Selanjutnya dicarikan jawabannya. Jawaban tersebut diperoleh dari pencarian terhadap teori-teori yang relevan.

3) Merumuskan hipotesis

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mencoba menjawab (memberikan solusi) yang diperoleh dari pencarian teori-teori yang relevan. Jawaban yang diperoleh selanjutnya disebut dengan jawaban sementara atau hipotesis. Jawaban sementara adalah hipotesisi. Jadi hipotesis dirumuskan dengan cara membaca atau mencari teori-teori yang cocok dengan solusi dari rumusan masalah dalam penelitian.

4) Melakukan pengumpulan data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus terlebih dahulu:

- a) Membuat instrumen penelitian berupa: kuisione, angket, test, lembar observasi, wawancara terstruktur dan instrumen yang telah terstandar.
- b) Menguji instrumen dengan menguji validitas dan reabilitas dari instrumen tersebut. Bila instrumen sudah selesai dibuat selanjutnya peneliti mengumpulkan data. Data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa data angka atau data deskripsi yang dikuantitatifkan.

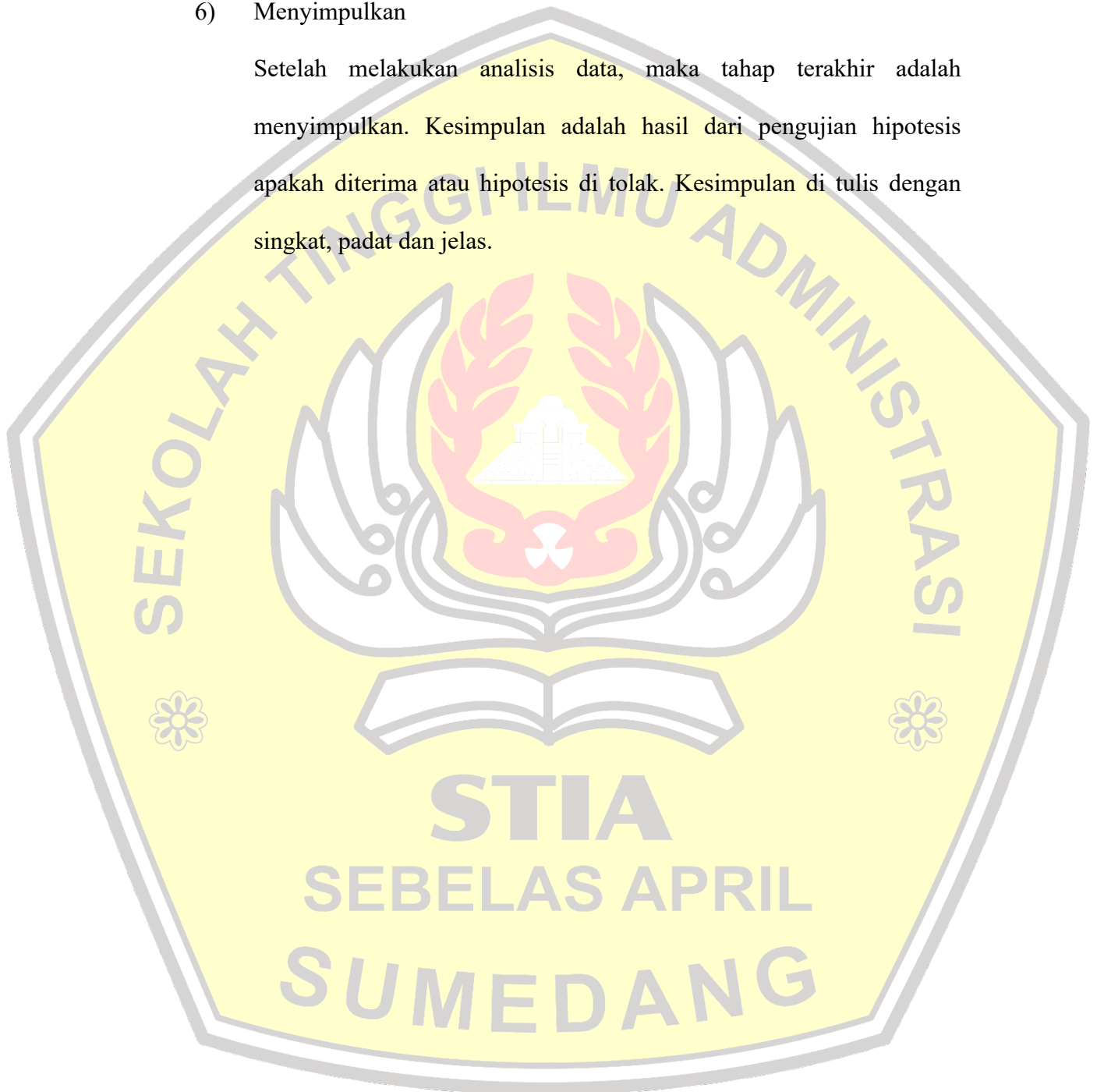
5) Melakukan Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat tadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah statistik. Statistik yang dapat digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik induktif. Data hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat

menggunakan tabel, grafi, dan diagram. dan pembahasan merupakan pembahasan yang mendalam dari data-data tersebut.

6) Menyimpulkan

Setelah melakukan analisis data, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari pengujian hipotesis apakah diterima atau hipotesis di tolak. Kesimpulan di tulis dengan singkat, padat dan jelas.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mendeskripsikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil pengujian terhadap sub hipotesis pertama penelitian, diperoleh bukti bahwa Terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kinerja Guru SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 69,30% sedangkan sisanya sebesar 30,70% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti seperti kepemimpinan dan budaya organisasi. Faktor-faktor yang mendukung tingginya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dari indikator pengelolaan dana BOS sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS memfasilitasi pertanyaan publik sehingga kinerja guru dianggap lebih baik.
2. Hasil pengujian terhadap sub hipotesis penelitian ke-2, diperoleh bukti bahwa Terdapat Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Guru SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 86,60% sedangkan sisanya 13,40% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti atau faktor *epsilon* sehingga diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Faktor yang mendukung tingginya transparansi anggaran yaitu dari indikator transparansi anggaran informasi yang mudah diakses yang didukung oleh keterbukaan dalam pengungkapan anggaran kepada semua pihak.

3. Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 87,30% sedangkan sisanya 12,70% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti atau faktor *efsilon* diantaranya gaya kepemimpinan, motivasi dan lain-lain. Faktor pendukung yang memiliki kategori penilaian tinggi yang mendukung tingginya kinerja guru di SMK Thursina yaitu dari indikator meraih prestasi dalam berbagai perlombaan maupun tingginya nilai rata-rata Ujian Nasional sehingga pada umumnya SMK Thursina walaupun umur berdirinya relatif masih muda tapi telah memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada siswa dan masyarakat.
4. Temuan-temuan permasalahan penting lainnya dalam variabel penelitian:
- a. Permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan Pengelolaan Dana BOS yaitu belum adanya pembinaan formal tentang perhitungan pemungutan pajak dan di lapangan masih adanya intervensi terkait pengadaan barang walaupun sudah berbasis *online*.
  - b. Permasalahan yang berkenaan dengan Transparansi Anggaran yaitu besaran dana BOS yang jauh dari rencana anggaran kegiatan sekolah sehingga tidak jarang sekolah mengalami *defisit* anggaran.
  - c. Permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan kinerja guru diantaranya adalah:
    - Masih rendahnya kesejahteraan guru di SMK Thursina apalagi didominasi oleh guru honorer.
    - Banyak guru yang kurang paham IT.

- Guru kurang dalam memotivasi siswa untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya sehingga banyak siswa yang memiliki potensi tapi kurang tergali.

## **B. Saran – Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang selama ini sudah cukup baik, namun untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS ke arah yang lebih baik lagi maka pihak sekolah harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terkait pengelolaan dana BOS, menolak intervensi serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, yayasan, komite termasuk guru juga harus berperan aktif dalam mengawasi penyelewengan-penyelewengan yang terjadi agar tercapai sesuai dengan rencana. Selain itu semua pihak juga harus turut mengawasi agar realisasi anggaran sesuai dengan RKAS yang melibatkan semua pihak.
2. Transparansi anggaran yang dilaksanakan pada SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dan efisien maka pihak sekolah harus dapat mengawasi seluruh rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang tercantum dalam dokumen RKAS, seluruh kegiatan dan anggaran harus mencerminkan informasi, keterbukaan dan pengungkapan yang mudah diakses oleh semua pihak terutama oleh kepala sekolah, yayasan, komite dan guru di SMK Thursina.

3. Agar kinerja guru dapat tercapai sesuai harapan maka sebaiknya pihak sekolah harus dapat meningkatkan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang efektif dan efisien, pihak sekolah harus dapat memberikan pelayanan yang sesuai juknis serta memotivasi siswa dan masyarakat agar dapat bekerjasama meningkatkan prestasi sekolah. Selain itu, faktor yang harus jadi perhatian juga adalah kesejahteraan guru harus lebih ditingkatkan serta adanya *reward and punishment* yang jelas karena berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti guru mengeluhkan masih rendahnya kesejahteraan guru hal ini karena kesejahteraan merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja pegawai dalam hal ini guru.
4. Sebagai saran lebih lanjut dan mengingat terdapatnya beberapa temuan pada penelitian serta terbatasnya waktu penelitian, maka pada penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain dan jumlah sampelnya sehingga mendapatkan faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.



**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YKPN: Yogyakarta
- AG Suharsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas Sudijono. (2006). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Dede Rosyada. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (alih bahasa: Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dwi Sulisworo. 2010. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Pendidikan dengan Balanced Scored Card*. Semarang: Sindur Press
- E Mulyasa. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ega Rezky Hastyarini. (2015). *Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2014*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Erwantosi. (2010). *Analisis Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang*. Tesis Universitas Andalas.
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode*. (alih bahasa: Imam Baihaqie). Bandung: Nusa Media
- J. Supranto. (2008). *Edisi Ketujuh Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan*. Melalui [kbbi.wed.id/](http://kbbi.wed.id/) diakses pada 15 Januari 2016.

- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Manullang M. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Malayu Hasibuan SP. (2007). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Hajimasagung.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muchlis Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyasa. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Priyatna, D., Komala, L., & Aditia, N. (2019). HUBUNGAN TATA RUANG KANTOR DENGAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(2), 52-62. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/68>
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul : Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono dan Agus Susanto. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarto. (1982). *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Supersukses.
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3, BPFE:Yogyakarta.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Internet:

[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) diakses tanggal 20 Juli 2021

[www.sumedangekspres.com](http://www.sumedangekspres.com) (24 Juni 2021)

Dokumen:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

